

Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir dan Perkembangan Gerakan Islam Reformis di Indonesia

*(Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir and The Development of Islamic
Reformist Movement in Indonesia)*

DOI 10.18196/AIJIS.2019.0103.203-225

MITSUO NAKAMURA

Emeritus Professor of Chiba University, Fellow of The Research Institute of Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA) of the Tokyo University of Foreign Studies (TUFS).
Email: mitsuon@za.tnc.ne.jp

.....

ABSTRACT

This article discusses the life, struggle, and personality of Abdul Kahar Muzakki in 2019 that was appointed as a National Hero. This study is based on the fact that information and studies on figures who play essential roles and contributions in the journey of the Indonesian nation are limited. As a result, it is not uncommon for people to mistake and confuse him with another figure, Abdul Kahar Muzakkar, who was a DI/TII leader. Therefore, this article that had been adapted from an academic lecture is translated and presented again for today's audience. The first discussion focused on the early formative period of Abdul Kahar Muzakkir and his work in the world of education and national politics. Then, this article discusses Abdul Kahar Muzakkir's position and role in the dynamics of the Islamist movement and political exemplary at the local and national level. By seeing his example in attitude, religion, and politics, the writer can even refute the views of Harry J. Benda and Clifford Geertz who argued that Indonesian politics is based on contestation between priyayi, secular, and Islam (H.J. Benda) or sectarian politics (C.J. Geertz). Abdul Kahar Muzakkir's personality and political role show that politics is also a battle between authorities and ordinary folks where Islam acts as a source of inspiration and moral aspirations for people to realize a just and prosperous society.

Keywords: Kotagede, Muhammadiyah, Cairo, Reformist Islamic movement, Abdul Kahar Muzakkir.

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang hidup, kiprah, dan kepribadian Abdul Kahar Muzakkir yang pada tahun 2019 lalu diangkat menjadi Pahlawan Nasional. Studi ini didasari atas

kenyataan bahwa informasi dan studi tentang tokoh yang berperan dan berkontribusi penting dalam perjalanan bangsa Indonesia ini masih sedikit. Akibatnya, tak jarang orang kemudian salah dan merancukannya dengan tokoh lain, Abdul Kahar Muzakkar, yang merupakan tokoh DI/TII. Oleh sebab itu, artikel yang diadaptasi dari ceramah ilmiah ini diterjemahkan dan disajikan kembali untuk audien masa kini. Pembahasan pertama difokuskan masa formatif awal Abdul Kahar Muzakkar dan kiprahnya di dunia pendidikan dan politik nasional. Lalu, artikel ini mendiskusikan posisi dan peran Abdul Kahar Muzakkar dalam dinamika gerakan Islamis dan keteladanan politik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan melihat keteladanan pribadinya dalam bersikap, beragama, dan berpolitik, penulis bahkan dapat membantah pandangan Harry J. Benda dan Clifford Geertz yang beranggapan bahwa politik Indonesia didasari oleh kontestasi antara golongan priyayi, sekuler, dan Islam (H.J. Benda) atau politik aliran (C. Geertz). Kepribadian dan peran politik Abdul Kahar Muzakkar menunjukkan bahwa politik juga merupakan pertarungan antara penggede dan wong cilik yang mana Islam dapat dijadikan sumber inspirasi dan aspirasi moral bagi wong cilik untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Kata kunci: Kotagede, Muhammadiyah, Kairo, gerakan Islam reformis, Abdul Kahar Muzakkar.

PENDAHULUAN

Tulisan ini diadaptasi dari pidato saya dalam sebuah pertemuan yang digelar pada 1975 atas prakarsa Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, dan the Australia-Indonesia Association dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-30. Dalam kesempatan itu, selain saya ada pula dua pembicara lain, yaitu Ben Anderson dan Mohammad Slamet, dan versi tulisan dari pidato kami diterbitkan oleh Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, dengan tajuk *Religion and Social Ethos in Indonesia* pada 1977. Dalam pembuka acara tersebut, Dr. Jamie Mackie (Direktur Centre of Southeast Asian Studies, Monash University sekaligus penyunting buku tersebut di atas) menyebut pidato saya sebagai "*a rare glimpse into the life of an Islamic leader*" (tinjauan sekilas yang jarang ada perihal kehidupan seorang tokoh Islam). Komentarnya itu sekaligus menunjukkan bahwa Prof. Abdul Kahar Muzakkar merupakan tokoh yang agak "tak terlihat," bahkan di kalangan peneliti kajian Indonesia kala itu. Harapannya, gelar pahlawan nasional yang baru-baru ini disematkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada Prof. Abdul Kahar Muzakkar dapat memantik penelitian akademik yang lebih serius tentang salah satu bapak bangsa itu, yakni penelitian yang bersendi pada sumber-sumber primer—sumber-sumber yang tidak dapat

saya gunakan dalam menyusun makalah ini (sebagaimana ditunjukkan di “Daftar Pustaka”). Di samping kekurangan ini, banyak catatan kaki yang asli pun kiranya juga agak usang, tetapi saya meminta kepada sang penerjemah, Sdr. Aditya Pratama, untuk mempertahankan catatan kaki itu, sebab catatan kaki itu merefleksikan situasi akademik dalam kajian Indonesia di awal 1970-an dan menunjukkan seberapa jauh kita telah berkembang.

Ada dua tujuan yang bertengger di benak saya tatkala menuangkan kenangan tentang kehidupan Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir.¹ *Pertama*, kisah hidupnya benar-benar mencerminkan kemajuan dan kemunduran yang dirasakan oleh gerakan Islam reformis di Indonesia sejak awal abad XX. Di samping itu, pernah pula dua kali—sebagaimana akan kita saksikan sebentar lagi—dia memainkan peran menonjol dalam beberapa peristiwa amat penting dalam masa yang paling menggemparkan dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam bulan-bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Kedua, ada banyak lagi alasan pribadi yang mendorong saya untuk berbagi kisah tentang sejarah Islam di Indonesia melalui kisah hidup dan kepribadiannya. Harapan saya, dengan memberitahu Anda tentang hal-hal yang saya pelajari darinya selama delapan belas bulan saya hidup di Kotagede²—kota kecil di dekat Yogyakarta tempat dia dilahirkan dan dibesarkan—setidaknya saya dapat membalas kebajikannya, yang dulu pernah membantu saya saat meneliti gerakan Islam reformis di Kotagede.³ Saya begitu berduka mendengar kematiannya yang mendadak akibat serangan jantung di usia 65 tahun pada 2 Desember 1973, sebelum saya sempat membalas kebaikan yang telah ia berikan. Jadi, melalui kenangan ini saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya kepadanya.

ABDUL KAHAR MUZAKKIR: HIDUP DAN KIPRAHNYA

Abdul Kahar Muzakkir lahir pada 1908 di Kotagede. Ayahnya adalah Kiai Haji Muzakkir, seorang guru agama yang juga aktif mengurus hajat Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Kakek buyutnya, Kiai Hasan Busyari merupakan syekh Tarekat Syattariyah⁴ setempat yang hidup di awal abad XIX dan pernah pula ikut berjuang dalam Perang Diponegoro (Perang Jawa [1825–1830]) sebagai komandan gerilya lokal namun kemudian dicekal dan diasingkan bersama sang Pangeran dan rekan-rekannya di Tondano (Sulawesi Utara). Di sana pula kakeknya wafat.

Abdul Kahar mengenyam pendidikan di sekolah dasar Muhammadiyah⁵ di Kotagede hingga kelas dua. Lantas dia melanjutkan pendidikannya di Pesantren Mambaul Ulum⁶ di Solo, lalu Pesantren Jamsaren dan Pesantren Tremas di Jawa Tengah. Pada 1925, di usia 16 tahun, dia bertolak ke Kairo untuk menimba ilmu, disokong oleh Haji Muchsin (pamannya dari pihak ibu) yang merupakan juragan grosir di Kotagede. Di Kairo, dia bersekolah di Darul Ulum (Rumah Ilmu), sebuah fakultas baru di Universitas Fuad I (kemudian berganti nama menjadi Universitas Kairo), dan lulus dari sana pada 1936 dengan mengantongi gelar pascasarjana dalam kajian hukum Islam, pedagogi, bahasa Arab, dan bahasa Ibrani. Selama dua belas tahun tinggal di Kairo, dia aktif bergulat dalam politik pelajar, mewakili para pelajar dari Jawah⁷ (istilah yang kala itu digunakan untuk menyebut Nusantara). Dia adalah pendiri Jamiyatul Syubban Muslimin dan seorang pemimpin Jamiyah Khairiyah Indonesia.⁸ Abdul Kahar Muzakkir pernah juga ikut serta dalam publikasi jurnal *Seruan Azhar*, organ dari Jamiyah Khairiyah Indonesia yang juga merupakan instrumen penting dalam mengumandangkan seruan reformisme Islam dan kesatuan antar umat Islam dari Kairo hingga Asia Tenggara Islam.⁹ Pada 1933, Abdul Kahar Muzakkir memainkan peran penting dalam pendirian Perhimpunan Indonesia Raya di Kairo (sebuah organisasi paralel Perhimpunan Indonesia di Belanda), dan dia terpilih sebagai ketuanya yang pertama. Di awal 1930-an Abdul Kahar Muzakkir menghadiri sejibun konferensi Islam tingkat internasional di Timur Tengah, mewakili para pelajar Indonesia di Kairo maupun juga umat Islam di Indonesia.

Di usia 28 tahun dia kembali ke Indonesia dan mulai mengajar di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah (sekolah guru Muhammadiyah) di Yogyakarta, dan tak lama kemudian menjadi direktornya. Hingga Perang Pasifik meletus, dia menjabat sebagai salah satu pengurus Pemuda Muhammadiyah dan Bahagian Penolong Kesengsaraan Oemoem. Pada 1938, Abdul Kahar bergabung dengan Partai Islam Indonesia (PII),¹⁰ dan terpilih sebagai salah satu komisarisnya hingga 1941. Pada 1939 dia diundang ke Jepang bersama tiga orang Muslim sebagai delegasi Indonesia untuk menghadiri Kongres Islam Asia Timur Jauh di Tokyo. Saat Jepang menduduki Indonesia, Abdul Kahar Muzakkir sempat bekerja di Departemen Hubungan Ekonomi Kesultanan Yogyakarta hingga 1943. Kemudian dia dipilih oleh Badan Intelijen Militer Jepang (Beppan) untuk menempati sebuah posisi di Jakarta, tepatnya sebagai komentator berita

untuk siaran luar negeri berbahasa Arab dan Inggris. Selama di Jakarta, pada 1944 Abdul Kahar dipindahkan ke Departemen Urusan Agama, lalu menjadi Kepala deputy departemen tersebut. Dia juga pernah ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Pusat dan kemudian menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mewakili umat Islam.¹¹

Dua bulan sebelum berakhirnya Perang Pasifik dan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Abdul Kahar ditunjuk menjadi anggota Panitia Sembilan, bersama Sukarno, Hatta, dan enam tokoh lainnya. Tugas mereka adalah menyusun dokumen yang semula dimaksudkan sebagai pembuka Undang-Undang Dasar 1945, yakni Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan wujud kompromi tuntutan umat Islam atas berdirinya negara Islam dan kehendak golongan nasionalis sekuler menjadikan Pancasila sebagai ideologi dasar negara.¹² Menjelang berakhirnya masa pendudukan Jepang, Kahar Muzakir juga berperan penting dalam mendirikan lembaga pendidikan tersier Islam bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) yang didirikan di Jakarta satu bulan sebelum Jepang menyerah kepada Sekutu. Dalam susunan kepengurusan STI, Mohammad Hatta ditunjuk sebagai direktur, sedangkan Abdul Kahar menjabat sebagai rektor. STI kemudian diboyong ke Yogyakarta pada 1947 dan berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia (UII), tempat Abdul Kahar Muzakir berkhidmat sebagai pendidik hingga ajal menjemputnya.

Selama masa agresi militer Belanda, Abdul Kahar Muzakir menjabat sebagai penasihat agama Angkatan Perang Sabil di Yogyakarta. Dalam era pascakolonial, dia banyak meluangkan waktu memajukan pendidikan tinggi Islam. Di samping tanggung jawab akademik dan administratifnya di UII, Abdul Kahar Muzakir juga ikut serta mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam milik pemerintah di Yogyakarta, yang kelak dikenal sebagai Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga (sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga—[penj.])¹³ dan menjadi tokoh yang dihormati oleh komunitas Muslim di Yogyakarta. Dari 1946 hingga kematiannya, dia berulang kali terpilih untuk mengawaki Pengurus Besar Muhammadiyah (kini Pimpinan Pusat Muhammadiyah—[penj.]). Selain itu, Abdul Kahar Muzakir juga aktif berpolitik dan memimpin Masyumi¹⁴ Cabang Yogyakarta saat berlangsungnya pemilu pertama pada 1955 dan terpilih menjadi anggota Dewan Konstituante dari faksi Masyumi, posisi yang dijabatnya hingga dewan tersebut dibubarkan oleh Sukarno pada 1959.

Nama Abdul Kahar Muzakkir juga berkibar di luar negeri dan juga kerap mewakili Umat Islam Indonesia di berbagai konferensi internasional. Abdul Kahar Muzakkir juga merupakan perwakilan permanen dalam Kongres Islam Dunia di Indonesia.

Saat meninggal dunia ia sebetulnya tengah mengemban amanah yang cukup banyak, beberapa di antaranya adalah sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, anggota Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Namun demikian, yang membuat kisah kehidupannya menjadi penting dan menarik bukanlah jabatan-jabatan formal di atas semata, melainkan juga kepribadian dan nilai-nilai Islam yang diamalkannya. Peralannya, itu semua banyak menceritakan kepada kita, dan dari situ kita mengerti apa makna hal-hal di atas bagi umat Islam.

Dari sekian banyak penghormatan kepada Abdul Kahar Muzakkir yang tampil di berbagai media cetak Islam, satu tulisan yang terbit dalam *Suara Muhammadiyah* (organ resmi Muhammadiyah)¹⁵ menyanjungnya sebagai “pemimpin teladan,” yang patut dicontoh oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Tulisan-tulisan lainnya mencandrakannya sebagai “perintis kebangunan ummat Islam” dan sebagai “pejuang kemerdekaan,” sementara salah satu kawan dekatnya sewaktu kecil dan sewaktu studi di Mesir menceritakan pencapaiannya yang luar biasa luas. “Dalam rentang hanya beberapa tahun pemuda santri dari Kotagede berhasil menjadi pemimpin pelajar dalam percaturan politik Islam internasional yang berpusat di sekitar Kairo; dan tatkala kembali ke Indonesia mantan pemuda santri tersebut segera dikenal sebagai ulama intelek dan sebagai sarjana Muslim, alhasil tidak hanya meraih status guru besar, melainkan lebih dari itu, menjadi ustaz.” Citranya yang gemilang di mata khalayak mengajak kita memahami perannya sebagai tokoh gerakan Islam reformis di Indonesia.

LATAR KOLONIALISME DAN GERAKAN ISLAM REFORMIS

Perlu diingat pula bahwa keluarga Abdul Kahar Muzakkir pernah berjasa menentang kekuasaan kolonial. Sebagaimana telah disebutkan di awal, kakek buyutnya mendukung perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda dan akhirnya diasingkan ke Tondano. Abdul Kahar Muzakkir begitu terharu tatkala mengunjungi makam kakek buyutnya di sana, demikian ungkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) yang kala itu menemaninya.¹⁶ Bagi Muslim Jawa Perang Diponegoro merupakan episode

perlawanan bersejarah yang dilancarkan oleh seorang Muslim saleh terhadap intrusi kolonialisme Belanda, dan kekalahannya menandai mulainya masa kemunduran total.

Ayah Abdul Kahar Muzakkir, yakni Kiai Haji Muzakkir, juga berkongsi dengan sekelompok ulama yang teguh pendiriannya. Ayahnya hidup sezaman dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah, yang kala itu merupakan *ketib amin* di Masjid Besar Yogyakarta), dan berkawan dekat dengannya. Sesungguhnya, Haji Dahlan pernah menikahi adik ipar Haji Muzakkir, meski pernikahan ini tak bertahan lama. Dahlan tinggal di Kauman Yogyakarta, di dekat Masjid Besar Yogyakarta. Memang benar, di akhir abad XIX dan awal abad XX banyak ulama dan kiai di Kauman, Kotagede, dan Karangakjen memiliki hubungan personal yang dekat antara satu sama lain, terkadang berkat pertalian perkawinan. Sejak dahulu, Kauman, Karangakjen, dan Kotagede (Tiga K) dikenal sebagai benteng Islam-nya Yogyakarta.

Dari lingkaran ulama tersebut langkah awal untuk mendirikan gerakan Islam reformis Muhammadiyah pada 1912 mulai muncul. Langkah itu mulanya berwujud bermacam kritik soal kendurnya ortodoksi keagamaan di keraton dan di tengah kaum priayi. Contohnya, banyak ulama dan kiai menyalahkan perilaku para penghuni keraton yang sering mengabaikan shalat wajib dan puasa. Mereka juga mengkritisi kiblat di berbagai masjid milik Kesultanan Yogyakarta—termasuk Masjid Besar Yogyakarta—yang tidak mengarah tepat ke Mekkah.¹⁷ Para ulama dan kiai juga tersinggung lantaran kalender yang digunakan oleh kesultanan tidak berdasar pada perhitungan astronomis yang tepat, melainkan hanya berdasar pada kalender bulan Jawa, sehingga penentuan Ramadhan tidak sesuai dengan pergerakan fisik bulan, sebagaimana diperintahkan oleh Al-Qur'an.

Selama bertahun-tahun kritik-kritik itu dilancarkan secara sporadis dan tak sistematis, pun begitu kritik-kritik itu turut memperlebar jurang antara ulama dan penghuni keraton. Barangkali, perbedaan antara golongan saleh-ortodoks dan penghuni keraton bukanlah cerita baru dalam sejarah Jawa di masa kerajaan Islam. Tetapi, kali ini ada elemen baru yang hadir, sebab di senjakala abad XIX para ulama mulai menggencarkan usaha mereka dalam memurnikan dan memperbaiki akidah dan praktik keagamaan yang bobrok. Mereka berhasil mendapatkan pengikut yang bersemangat dari kalangan dagang bumiputra yang hidup di kawasan perkotaan; di samping itu, kelak usaha mereka berevolusi menjadi

organisasi yang lebih mantap dan terstruktur, Muhammadiyah.

Pada titik ini, saya harus menjelaskan hubungan antara hubungan ekonomi yang ada di penghujung abad XIX dan kemunculan gerakan Islam reformis, sebagaimana yang dapat diamati di Kotagede. *Pertama*, kebijakan liberal pemerintah kolonial melahirkan perubahan sosial-ekonomi yang dahsyat. Sejak sekitaran 1860-an dan 1870-an, ketika jalur kereta api mulai merasuk ke daerah pedalaman Jawa Tengah, daerah itu mulai dibanjiri oleh kehadiran berbagai perusahaan swasta Eropa. Perusahaan-perusahaan itu memperoleh hak sewa atas lahan yang luas dari para *patuh* (pemilik apanase), dan menyulapnya menjadi kebun (atau ladang) tanaman komersial yang diolah oleh kaum buruh atau tani yang hidup di situ. Dalam sekejap banyak desa didorong untuk ikut menyemarakkan ekonomi uang. Dalam satu generasi, berbagai sudut di Jawa yang tanahnya subur dan dapat menghasilkan tanaman komersial—yang paling terpencil sekalipun—berhasil dihubungkan dengan pusat-pusat industri oleh untaian rel kereta api dan jalan yang begitu panjang.

Rupanya, perubahan drastis ini banyak memengaruhi Kotagede. Dahulu, Kotagede dan kota-kota lain di tingkat lokal pernah menjadi kawasan dagang dan industri kerajinan bumiputra di Jawa Tengah bagian selatan—sebuah wilayah yang kala itu masih diwarnai oleh ekonomi pertanian swasembada-subsisten. Ekonomi liberal meruntuhkan itu semua. Jumlah penduduk Kotagede membengkak dengan cepatnya, demikian pula tuntutan atas barang dagang (kebutuhan harian) seperti batik dan kain-kain lainnya, perkakas pertanian, peralatan dapur, perhiasan, serta barang-barang ornamen dan dekoratif, tanaman industri-papan, dan makanan siap saji. Alahsil, seketika itu penduduk Kotagede secara umum memperoleh kemakmuran yang bukan kepalang hebatnya dan, lebih khususnya, kaum dagang yang sukses pun bertumbuh. Di akhir abad XIX, Kotagede kondang akan kehadiran sekitar setengah lusin raja dagang yang kekayaannya melampaui kekayaan para priayi setempat dan bahkan menyaingi keraton. Akan tetapi, kaum dagang itu tidak diizinkan untuk mengenakan jubah kebangsawanan. Pendidikan Belanda juga hanya boleh diakses oleh anak priayi saja. Menghadapi rintangan sosial semacam itu, tentu saja bumiputra kelas menengah perkotaan lebih memilih jalan yang sudah terbuka, yakni mendongkrak gengsi mereka dengan menunaikan haji ke Mekkah. Meroketnya prestise pesantren sepertinya juga mencerminkan perkembangan itu.

Perkembangan-perkembangan itu dilambangkan oleh kehidupan Abdul Kahar Muzakkir. Dia lahir di tengah keluarga ulama berbekal kemandirian yang sudah bercokol sejak lama, dan kini kian terdorong oleh hayati kesalehan dan kepatuhan yang kuat dalam beragama. Selain itu, dia juga diuntungkan oleh kemakmuran yang baru saja menghampiri keluarganya; pamannya, Haji Muchsin, merupakan salah satu raja dagang di Kotagede, dan memiliki lisensi untuk mengimpor dan mendistribusikan kain katun halus, mori, dan zat pewarna kimia di Jawa Tengah (atau *Vorstenlanden*). Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Haji Muchsin pula yang menyponsori studi Abdul Kahar di Kairo dari 1925 hingga 1936.

ABDUL KAHAR MUZAKKIR DAN GERAKAN ISLAM REFORMIS

Tahun-tahun di Kairo memberi pengalaman penting bagi Abdul Kahar, demikian pula bagi para perantau Indonesia yang lain. Meski sarjana-sarjana lain berpendapat bahwa ajaran Islam reformis di Indonesia berasal dari Universitas Al-Azhar dan para tokoh reformis seperti Muhammad 'Abduh dan Rashid Rida, saya tidak menemukan bukti bahwa kehadiran reformisme Islam langgam Mesir berdampak langsung terhadap gerakan Muhammadiyah di Jawa dalam perkembangan awal gerakan itu.¹⁸ Yang pertama kali terpapar oleh pengaruh reformisme Islam Mesir adalah generasi kedua Muhammadiyah—yang dilambangkan oleh orang seperti Abdul Kahar Muzakkir. Di samping itu, perlu pula diperhatikan bahwa kebanyakan pelajar Jawa di Kairo (yang jumlah keseluruhannya mencapai sekitar 200 orang di akhir 1920-an) lebih tertarik pada Kota Kairo yang “tradisional” ketimbang Al-Azhar sendiri. Para pelajar Jawa lebih tertarik pada Universitas Kairo lantaran kurikulumnya yang tersistematis, mencakup banyak mata kuliah sekuler yang diajarkan menggunakan bahasa Arab modern dan juga Inggris.¹⁹ Fakta itu dapat diamati dari pengalaman para pemuda Kotagede di Kairo. Antara 1925–1936 enam pemuda Kotagede menghabiskan beberapa tahun untuk belajar di Kairo. Abdul Kahar menimba ilmu di Darul Ulum. Dua saudara sepupunya (putra Haji Muchin sendiri) pun segera menyusulnya, yang satu menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas dalam bidang perniagaan, sedangkan yang satunya lagi menyelesaikan pendidikan vokasi (*certificate*) dari sekolah persiapan untuk mengenyam pendidikan di *The American University* in Cairo (kemudian juga memperoleh gelar dokter di Universitas Amsterdam). Seorang anak raja dagang lainnya memperoleh gelar sarjana muda dalam

bidang perbandingan agama dari Universitas Kairo. Jika dibandingkan dengan reformisme Islam langgam Indonesia, reformisme Islam langgam Mesir sifatnya lebih teologis, elitis, dan berorientasi intelektual.

Tentu saja, *Tafsir Qur'an* karangan Muhammad 'Abduh pernah—dan masih—memengaruhi reformisme Islam langgam Indonesia. Tetapi, dalam hal aktivitas organisasi yang aktual gerakan reformisme Islam langgam Indonesia mengungguli model gerakan Islam langgam Mesir, baik menyangkut keragaman maupun besarnya basis massanya. Jadi, reformisme Islam langgam Indonesia dikembangkan secara mandiri dari dalam, dan peran komunitas pelajar Indonesia di luar negeri bukan sekadar berperan sebagai penghubung semata. Reformisme Islam langgam Mesir disaring dan ditafsirkan ulang oleh mereka. Di samping itu, yang lebih penting adalah pengalaman dan keterlibatan para pelajar Indonesia dalam kehidupan politik riil dengan nasionalisme Mesir dan internasionalisme Muslim. Sebagaimana telah kita lihat, di Kairo pula cita-cita persatuan umat Islam se-Nusantara (yang mencakup Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina) diwujudkan dalam bentuk organisasi.²⁰ Akan tetapi, pada medio 1930-an, para pelajar Indonesia mulai menghadapi kesulitan keuangan dan, kemudian, ancaman perang memutus aliran perantau dari Indonesia ke Mesir. Namun demikian, reformisme Islam Indonesia mampu terus berkembang, dan itu membuktikan bahwa utamanya reformisme Islam Indonesia mampu bergerak secara mandiri dengan daya sendiri.

Pada 1930-an Jawa sepi dari hiruk-pikuk politik, tetapi 1930-an adalah masa ketika kaum Muslim reformis bertarung habis-habisan dalam urusan keagamaan guna memapankan kedudukan mereka sebagai umat yang merdeka. Di Kotagede proses ini dicerminkan oleh konflik antara para pejabat keraton dan Muhammadiyah dalam memperebutkan hak penggunaan Masjid Ageng Mataram. Sebelumnya, Masjid Ageng Mataram adalah lembaga yang mendominasi kehidupan penduduk Kotagede. Dipayungi oleh sepasang pohon beringin raksasa, dengan dikelilingi oleh dinding dan gerbang bergaya Hindu-Bali yang menaungi pemakaman Kerajaan Mataram, terang sekali kompleks Masjid Ageng Mataram adalah situs yang paling keramat di antara berbagai situs keramat lain di Kotagede. Kompleks Masjid Ageng Mataram adalah salah satu tempat amat penting untuk menyelenggarakan pusparagam upacara resmi Kerajaan Mataram, dan untuk menyelenggarakan upacara-upacara itu sumber daya manusia dan material dikerahkan dan dimanfaatkan dalam bentuk kerja bakti, pajak,

dan berbagai layanan pribadi lainnya.

Masjid Ageng Mataram pun tak pelak menjadi target serangan gencar reformisme Muhammadiyah. Dipelopori oleh Haji Masyhudi (salah satu paman Abdul Kahar dari pihak ibu) para pegiat Muhammadiyah di Kotagede mengajukan permohonan untuk menggulirkan reformasi Islam di hadapan para pejabat keraton yang mengurus Masjid Ageng Mataram. Adapun permintaan Muhammadiyah antara lain adalah, (1) agar masjid dapat dibuka dengan bebas dan dimanfaatkan secara sukarela oleh penduduk setempat, (2) agar shalat Jumat dibuka untuk khalayak dan khotbahnya disampaikan dalam bahasa Jawa, (3) agar kebiasaan “tak Islami” seperti pembagian uang kepada pada jamaah shalat tarawih selama bulan puasa segera ditinggalkan, (4) agar praktik perdukunan di kompleks masjid dilarang, dan seterusnya. Perlawanan pihak keraton terhadap reformasi itu juga tak kalah sengitnya, sebagian akibat adanya dukungan laten dari pemerintah Belanda yang berusaha mempertahankan kekuasaan para raja bumiputra.

Akhirnya, di penghujung 1930-an Muhammadiyah memutuskan untuk memisahkan diri dari Masjid Ageng Mataram dan mendirikan masjid baru atas biaya sendiri, yang pembangunannya selesai pada 1939. Masjid baru ini dinamai Masjid Perak, dan namanya mencerminkan bahwa sebagian besar sumbangan untuk pendiriannya mengalir dari kantong-kantong para juragan perak yang luar biasa makmur pada 1920-an dan 1930-an. Kata *perak* merupakan kata serapan dari bahasa Arab, *firaq*, yang berarti ‘pemisahan’ dan ‘kemerdekaan,’ yang menyiratkan kemerdekaan kaum Muslim reformis dari Kesultanan Yogyakarta dan para pejabat agama tradisional. Haji Muzakkir (ayah Abdul Kahar Muzakkir) menjadi salah satu anggota takmir masjid tersebut.

Tak lama kemudian, kaum Muslim reformis menghadapi keadaan yang sama sekali baru, yakni keadaannya yang muncul akibat menyerahnya Belanda ke tangan Jepang. Tak lama berselang, kaum Muslim reformis kembali menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh perang kemerdekaan pada 1945. Tokoh-tokoh Muhammadiyah, yang kala itu begitu berpengaruh dalam Partai Masyumi, kian dalam terlibat dalam politik nasional. Di waktu yang bersamaan Abdul Kahar Muzakkir pun mulai banyak terlibat dalam politik nasional. Kemunculan dramatis Masyumi sebagai kekuatan politik utama tak belangsung lama, partai itu meredup secara dramatis pula di medio 1950-an, adapun alasannya sudah cukup

banyak disinggung dalam sumber lain.²¹ Tenggelmnya Masyumi seringkali digambarkan hanya sebagai kekalahan politik para tokoh Islam, meski sebetulnya lebih rumit dari itu—itu akan kita saksikan dalam bahasan tentang hubungan antara agama dan politik di Indonesia.

Meski Kahar Muzakkir adalah salah satu begawan politik Indonesia di masa revolusi kemerdekaan dan demokrasi parlementer, ketika bertemu dengannya saya begitu heran lantaran tak tampak dalam dirinya ciri-ciri politisi pada umumnya. Abdul Kahar Muzakkir yang saya kenal bukanlah tokoh yang lapar kekuasaan dan tidak pula dia senang memamerkan kekuasaannya. Baginya, signifikansi politik masih jauh di bawah komitmennya pada pendidikan agama dan dakwah. Manakala keadaan memaksanya untuk terjun ke arena perkelahian politik, Abdul Kahar Muzakkir tidak ragu-ragu untuk bertarung, tetapi jika keadaannya sedang tenang, dia pun tidak aktif dalam urusan politik. Anggapan kita tentang *homo politicus* sama sekali tidak berlaku bagi tokoh Muslim seperti Abdul Kahar Muzakkir, orang yang telah menemukan sesuatu hal yang jauh lebih berharga ketimbang kekuasaan dan gengsi. Ketika orang-orang semacam itu tersingkir dari arena politik, mereka tidak panik, tidak pula putus asa atau frustrasi, melainkan mereka memilih untuk mengurus hal yang menjadi perhatian utamanya, agama.

ABDUL KAHAR MUZAKKIR, ISLAM, DAN POLITIK: REVISI PANDANGAN BENDA DAN GEERTZ

Ben Anderson pernah menunjukkan aspek diplomatis dari hubungan antara umat Islam dan politik sekuler.²² Paparannya tampak cukup menarik. Tetapi, saya perlu menambahkan bahwasannya para diplomat jarang berasal dari eselon tertinggi pemimpin sebuah negara, demikian pula “diplomat” umat Islam, mereka tidak menduduki struktur tertinggi dalam umat Islam. Para “diplomat” umat Islam yang berpolitik jamaknya adalah tokoh periferi atau kelas dua, namun mereka memiliki keterampilan “diplomatik” sehingga mereka dipercaya untuk mengemban kepentingan umat dalam berurusan dengan pemangku kekuasaan. Umat Islam membiarkan “politisi Muslim” tersebut untuk berbuat semaunya, sekalipun itu pekerjaan kotor. “Biarlah,” kata mereka, meski mereka tidak begitu percaya dan menghormati para “politisi Muslim.” Jadi, dukungan yang diterima para politisi dari umat Islam memang agak lemah, dan hubungan antara mereka pun dangkal. Alhasil, tak jarang ada politisi Muslim kelas

dua—yang komitmennya terhadap umat Islam tidak teguh—yang dibutakan oleh kekuasaan dan gengsi yang sama sekali sekuler hingga akhirnya meninggalkan umat Islam demi orang yang berkuasa.

Di sini, saya akan menyajikan pandangan umum tentang Islam dan politik. Jika pengamatan saya sejauh ini dapat dipertahankan, maka pandangan saya berseberangan dengan pendekatan Benda-Geertz di beberapa poin penting. Benda memandang politik Indonesia pascakolonial sebagai perkelahian segitiga antara golongan priayi (bangsawan dan birokrat), nasionalis sekuler, dan umat Islam.²³ Geertz merevisi pendekatan itu sebagai perkelahian antar aliran dengan orientasi nilai dan pandangan dunia yang berkorelasi dengan basis institusional, komitmen politik, dan afiliasi organisasi.²⁴ Ia menemukan ada empat aliran yang sejalan dengan empat partai politik, yakni PNI, PKI, NU, dan Masyumi. Geertz sendiri kemudian berusaha menyesuaikan situasi terkini dengan memperkenalkan gagasan perihal perkembangan *denominalisasi*; di bawah kuasa militer yang tak tertandingi, aliran-aliran lama pun mulai melunak dan tak lagi bersikap eksklusif antara satu sama lain, mereka berjuang mencari cara untuk dapat hidup bersama dengan damai.²⁵

Terlepas dari kebenaran pandangan ini dalam hal-hal detail, salah satu ciri fundamental dari pendekatan aliran-aliran itu adalah mereka dibangun di atas premis bahwa politik Indonesia adalah permainan kekuasaan yang dapat dipahami sebagai kompetisi antar kelompok dalam memperebutkan kekuasaan dengan berbekal hak yang kira-kira setara. Bagi saya, premis ini dapat dipertanyakan. Kendati kita boleh menggunakan metafora bahwa politik adalah permainan, kontes, kompetisi, yang digulirkan berdasarkan aturan yang telah disepakati oleh orang banyak, terkadang politik bukanlah permainan yang adil, khususnya di Indonesia. Berbagai kelompok yang saling bersaing—jika mereka memang benar-benar bersaing—tidak mulai di posisi yang sama antara satu sama lain. Pada kenyataannya, permainan politik ini umumnya sudah tidak adil sejak awal, pasalnya beberapa kelompok sebelumnya sudah memiliki kekuasaan, sedangkan kelompok lain tidak. Mozaik politik Indonesia pascakolonial selalu diwarnai oleh pembagian antara penguasa dan yang dikuasai, atau antara *penggede* dan *wong cilik*.

Lantas, apa relevansi Islam dalam situasi seperti itu? Menurut hemat saya, pada umumnya Islam utamanya selalu memikat perhatian *wong cilik*. Inilah ironi sejarah. Tidak walaupun, tetapi melainkan karena pernah

ditolak sebagai ideologi Negara Republik Indonesia (penolakan Piagam Jakarta) maka Islam mampu menjadi inspirasi sekaligus menjelma menjadi ungkapan keluhan orang-orang tak berdaya di pinggiran kekuasaan, khususnya tatkala korupsi, penyelewengan wewenang oleh penguasa, dan amat timpangnya pendistribusian kemakmuran merajalela. Dalam situasi seperti ini, Islam menjadi pedoman untuk menegakkan kejujuran, mempererat ikatan antarmanusia, dan tempat mencari nasihat etis, pedoman yang diambil dari Sang Absolut, Sang Maha Kuasa tempat berlindung bagi orang-orang lemah. Inilah mengapa aspirasi rakyat akan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sering dijiwai oleh semangat Islam. Inilah mengapa keluhan khalayak berulang kali diungkapkan dalam bahasa Islam, dan yang demikian itu sulit dicegah.

Namun demikian, dari yang telah saya katakan di awal tidaklah tepat jika kita menganggap ungkapan politik umat Islam berusaha membentuk elite tandingan atau elite alternatif yang tujuannya adalah menumbangkan pemerintah petahana. Aspirasi politik umat Islam yang sejati belum pernah, dan tidak pernah, diarahkan untuk memperebutkan kekuasaan dalam pengertian sekuler. Mereka tidak berusaha untuk merebut kekuasaan sekuler, melainkan berjuang keras menciptakan dan mengalami kekuasaan dalam bentuk yang berbeda. Politik hanyalah salah satu aspek (aspek sekunder) dari kehidupan umat Islam, dan menerjemahkan perilaku politik mereka menggunakan bahasa sekuler hanya akan dapat menghadirkan kebenaran yang setengah benar saja. Tujuan mereka berbeda, dan aturan main mereka—atau permainan mereka sendiri—pun juga berbeda, maka seyogianya harus dilihat melalui perspektif mereka sendiri.

KEPRIBADIAN ABDUL KAHAR MUZAKKIR: *SEDERHANA, RAMAH, DAN IKHLAS*

Sungguhnya, saya dapat melukiskan poin di atas dengan memaparkan kepribadian Prof. Kahar Muzakkir sendiri. Jelaslah sekarang bahwa saya begitu terkesan padanya dan menghormatinya secara pribadi. Guna meminimalkan subjektivitas yang muncul akibat kekaguman saya kepadanya, dalam menggambarkan kepribadiannya bolehlah kita menggunakan istilah yang biasa digunakan oleh orang Jawa.²⁶ Tiga istilah itu, yakni *sederhana*, *ramah tamah*, dan *ikhlas*, adalah istilah yang umumnya dipakai untuk menggambarkan kepribadian dan gaya hidupnya. Rumahnya, yang diwariskan kepadanya oleh Haji Muzakkir, berdiri di atas

sebuah lahan luas dan bangunannya sendiri pun besar. Tetapi, tidak ada barang-barang mewah pula bergaya di dalamnya. Begitu masuk ke dalam rumah itu, kita dapat melihat furnitur ruang tamu sederhana di pendopo, yang belakang hari dirubah menjadi kamar tamu berdinding. Dahulu, salah satu sentong rumah yang sederhana dengan ukuran kira-kira 2,5 meter x 3,5 meter dan berlantai kayu digunakan sebagai kamar studinya dan ruang penginapan tamu. Di sana dia biasa duduk di atas tikar, tanpa ada furnitur lainnya selain meja pendek dan beberapa bantal. Buku-buku yang ditimbulk menghadap dinding hanyalah barang-barang berharga yang ditemukan di sana.

Satu-satunya kendaraan “modern” milik Abdul Kahar Muzakkir hanyalah motor skuter bekas yang diberikan oleh salah satu mahasiswanya beberapa tahun yang lampau, dan kerap rusak. Saat skuternya rusak, untuk pergi menuju Universitas Islam atau Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah (yang berjarak lima atau enam kilometer dari Kotagede) dia pun bersepeda atau naik andong atau becak. Sambil mengenakan pakaian sederhana (kemeja putih tua tak berdasi, sarung, sepasang sandal, dan selalu mengenakan peci) Abdul Kahar Muzakkir membalas sapaan orang-orang yang dijumpainya di sepanjang jalan.

Abdul Kahar Muzakkir benar-benar seorang sosok yang ramah tamah, bersahabat, “informal”, dan murah hati. Meski saya cukup jarang bertemu dengannya saat saya tinggal di Kotagede, dia selalu meluangkan waktu untuk menerima tamu di Jumat pagi, baik itu tamu lokal, nasional, maupun internasional. Dia bertemu dengan mereka dalam satu kelompok, mendiskusikan masalah atau permintaan yang diajukan tamu-tamunya satu per satu, meminta komentar dari orang lain yang hadir dalam pertemuan itu. Lalu, ketika waktu shalat Jumat tiba, sang tuan rumah dan tamu-tamunya bergegas melangkahhkan kaki menuju Masjid Ageng Mataram yang berjarak seputaran 200 meter dari rumahnya dan shalat di sana (meski pada 1930-an Muhammadiyah sempat memisahkan diri dari masjid ini, tak lama selepas kemerdekaan hubungan antara keduanya kembali baik). Lepas itu, tamu-tamunya kembali ke rumahnya dan makan siang bersama. Rumah yang saya tempati kala itu hanya berjarak 150 meter dari rumahnya, dan sebetulnya saya dapat dengan mudahnya pulang untuk makan siang, tetapi Prof. Abdul Kahar Muzakkir tidak pernah mengizinkan saya untuk “*nuwun pamit*”.

Kebanyakan tamunya adalah mahasiswanya, baik dari UII, Universitas

Gajah Mada, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, ataupun perguruan tinggi dan universitas lain di Jawa Tengah. Salah satu pemandangan khas adalah kerap kali pelajar Muslim dari Malaysia, Thailand, dan Filipina pun ikut bertamu ke rumahnya. Solidaritas Muslim se-Nusantara yang tercipta saat dia belajar di Kairo masih terpelihara dan dihidupkan kembali di pendoponya. Tamu-tamu yang menghampirinya juga mencakup mantan mahasiswanya yang kini bekerja di sekolah menengah atas, perguruan tinggi, universitas, atau di kantor urusan agama (KUA) di berbagai sudut Jawa dan tempat-tempat lain di Indonesia.

Sekarang kita beralih ke istilah ketiga, *ikhlas*. Istilah ini jamak digunakan oleh kolega Muslim Abdul Kahar Muzakkir untuk melukiskan kepribadiannya. Contohnya, *Suara Muhammadiyah* menggambarkannya sebagai “pejuang yang ikhlas dan sederhana” dalam orbituarnya. Ikhlas—yang artinya tulus hati—adalah kata yang diambil dari Al-Qur’an dan ada salah satu surat yang bertajuk “Al-Ikhlas”. Sebagai istilah berkenaan etika yang bersifat umum, ikhlas berlawanan dengan pamrih.²⁷ Kehidupan Prof. Abdul Kahar Muzakkir tentu dapat digambarkan sebagai kehidupan penuh keikhlasan, diwarnai oleh usaha yang tiada putus untuk mengabdikan kepada Allah, membuang segala keinginan untuk memikirkan kepentingan pribadi, demikian yang diakui oleh lawan politiknya dan umat agama lain.

Kini muncullah masalah yang menantang dari pengamatan ini. Jika kehidupan Almarhum Prof. Abdul Kahar Muzakkir dapat dikatakan penuh ikhlas dan tanpa pamrih, kita perlu menyadari bahwa istilah-istilah itu berasal dari bahasa yang berbeda. Secara etimologis, *ikhlas* adalah kata dari bahasa Arab yang lekat dengan Islam, sedangkan *pamrih* adalah kata dari bahasa Jawa dan merupakan kata jadian dari dunia epos Hindu-Jawa. Dengan meninggalkan pamrih seseorang dapat mencapai peringkat kesatria. Kedua istilah itu dapat dipandang sebagai istilah kunci dalam dua pandangan dunia yang berbeda, yakni Islam dan Hindu-Jawa. Jika demikian, beberapa pengamat boleh jadi kebingungan ketika mengetahui bahwa Prof. Kahar Muzakkir yang seorang Muslim reformis digambarkan sebagai sosok yang *ikhlas* tanpa kenal *pamrih* oleh kolega-koleganya yang agaknya telah memurnikan Islam dari elemen-elemen tak Islami. Sekarang, masalahnya lebih eksplisit seperti ini, pengamat asing jamak melukiskan bahwa Islam—khususnya Islam reformis—merupakan berseberangan, antitesis, atau tidak sesuai dengan kejawaan yang tulen.²⁸ Akan tetapi, Prof. Kahar Muzakkir dan tokoh-tokoh lain asal Kotagede yang sekaliber

dengannya adalah orang Jawa tulen sekaligus Muslim yang taat. Jika pikiran kita dipenuhi oleh konsep semu tentang antagonisme antara Islam dan kejawaan, mustahil bagi kita untuk memahami sosok seperti Prof. Abdul Kahar Muzakkir. Dia bukanlah seorang penderita skizofrenia budaya. Dan dia bukanlah kasus istimewa. Terang sekali, "*sepi ing pamrih, rame ing gawe*" (tidak berpamrih, banyak bekerja)—kata-kata yang oleh Ben Anderson disebut sebagai motonya kaum priayi Jawa—merupakan moto Pergerakan Muhammadiyah juga.²⁹ Lantas, melalui pengamatan ini saya ingin menegaskan bahwa ada bias yang besar dalam lensa pengamatan kita. Lensa yang dirancang untuk memilah asal-usul budaya mungkin cocok untuk mengklasifikasi benda mati, tetapi tidak sesuai untuk memahami manusia yang masih hidup.

Satu hari setelah wafat, jenazah Prof. Abdul Kahar Muzakkir ditempatkan di serambi Masjid Ageng Mataram di Kotagede, dan ribuan orang datang melayat. Kemudian jenazahnya dikebumikan di permakaman kampungnya, dekat makam keluarga dan kerabatnya, termasuk Haji Muzakkir, Haji Muchsin, dan Haji Masyhudi. Jumlah para pelayat itu begitu banyak, dan kiranya selama beberapa tahun belakangan Kotagede belum pernah dipadati oleh para pelayat sebanyak itu. Garibnya, tiada seorang pun perwakilan pemerintah pusat yang hadir kala itu. Prosesi pemakaman itu sifatnya sama sekali swasta (tanpa peran pemerintah), sekaligus menjadi saksi atas kesatuan dan kemerdekaan umat Islam yang sejenak muncul untuk acara ini. Besarnya jumlah pelayat menunjukkan betapa Prof. Abdul Kahar Muzakkir begitu dihormati sebagai tokoh dan penasihat oleh banyak orang. Dari luar dia boleh tampak tak terkenal, tetapi di tengah umat Islam dia adalah sosok cemerlang pemelihara silaturahmi antara masyarakat yang tiada putusya.

KESIMPULAN

Kini, mohon izinkan saya mengemukakan poin akhir tentang implikasi kehidupan Prof. Abdul Kahar Muzakkir bagi pengetahuan kita tentang Indonesia. Jika Prof. Abdul Kahar Muzakkir terlupakan, maka kitalah yang kurang berpikiran panjang dan melupakannya, tetapi bukan Muslim Indonesia. Jika kita terheran-heran akan keuletan Islam di Indonesia saat ini (sebagaimana dicerminkan oleh kisah kehidupan dan kematian Prof. Abdul Kahar Muzakkir), kitalah yang silap karena telah mengambil fenomena kulit luar untuk dicerna secara mendalam. Jika kisah tentang kehidupan

Allahuyarham Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir ini entah bagaimana berhasil membagikan releksinya kepada Anda sekalian akan kekurangan pengetahuan kita tentang studi Indonesia, maka tercapailah maksud utama pembicaraan saya.

ENDNOTE

- ¹ Abdul Kahar Muzakkir (1908–1973) kerap kali dirancukan dengan Kahar Muzakkar (Qahhar Mudzakkar, sekitar 1919–1965), pemimpin pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Sulawesi Selatan di sepanjang 1950-an dan awal 1960-an. Contohnya, dalam *Sukarno: A Political Biography* (London: Pelican Books, 1973) J.D. Legge awalnya membedakan ada dua Kahar yang berbeda, tetapi kemudian di bagian indeks yang dimunculkannya hanyalah satu Kahar saja. William R. Roff—dalam “Indonesian and Malay Students in Cairo in the 1920’s,” *Indonesia*, No. 9 (April 1970), hlm. 73–87—juga silap mata dalam membaca penulis dokumen yang ditelitinya sebagai Abdul Kahar Muzakkar, yang betul adalah Abdul Kahar Muzakkir. Kerancuan ini sebagian adalah akibat dari beragam cara yang sah dalam mentransliterasikan kata dari bahasa Arab, yang biasanya membuat pilihan huruf vokal menjadi ambigu ketika dituliskan dalam transkrip Inggris atau Indonesia. Kerancuan ini juga disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan pengamat asing soal Kahar Muzakkir (yang belakangan hari undur diri dari panggung politik nasional), sementara nama Kahar Muzakkar justru melesat dan mendapatkan perhatian sebagai pemimpin pemberontakan. Terkait Kahar Muzakkar, lihat Barbara Harvey, “Tradition, Islam and Rebellion, South Sulawesi, 1950-1965” (disertasi doktoral di Cornell University, 1974).
- ² Kotagede terletak sekitar enam kilometer di sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Dewasa ini, di mata pelancong kota tersebut mahsyur sebagai pusat kerajinan perak. Selain itu, Kotagede juga merupakan pusat urban tertua dalam sejarah Jawa, telah berdiri sejak akhir 1500 ketika kota itu menjadi ibukota pertama Kerajaan Mataram. Menyangkut latar belakang kesejarahan dan catatan kontemporer kota itu pada 1920-an, lihat H.J. van Mook, “Kuta Gede”, dalam W.F. Wertheim (peny.), *The Indonesian Town: Studies in Urban Sociology* (The Hague: W. van Hoeve, 1958), hlm. 275–331.
- ³ Terkait perkembangan gerakan Islam reformis di Kotagede, lihat disertasi saya yang belum diterbitkan, “The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town” (disertasi doktoral di Cornell University, 1976).
- ⁴ Rupanya Tarekat Syattariyah (atau Sadariyah) populer di tengah warga Yogyakarta hingga masuknya Tarekat Naqsyabandiyah dan Qadiriyyah—yang kemunculannya ditunjang oleh kian eratnya hubungan dengan Timur Tengah di penghujung abad XIX. Bandingkan dengan L.W.C. Van den Berg, “Over de devotie der Naqsjibendijah in den Indischen Archipel,” *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* (Bataviaasch Genootschap van Kunsten en

Wetenschappen), XXVIII (1883), hlm. 158–175. Tentang peran tarekat dalam pemberontakan petani di abad XIX, lihat Sartono Kartodirdjo, *The Peasant Revolt of Banten in 1888. Its Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia* (The Hague: De Nederlandsche Boek- en Steendrukkerij v/h Smits, 1966), hlm. 157–165.

- ⁵ Muhammadiyah sejak awal didirikan untuk memurnikan ibadah dan membangkitkan kembali iman (akidah) di tengah umat Islam Jawa. Persyarikatan ini menekankan pada pembaruan pendidikan tradisional (pesantren) dan mengembangkan aktivitas kesejahteraan sosial. Tentang sejarah Muhammadiyah di era pra-Perang Dunia II, lihat Alfian, “Islamic Modernism in Indonesian Politics: The Muhammadiyah Movement During the Dutch Colonial Period, 1912-1942” (disertasi doktoral di University of Wisconsin, 1969).
- ⁶ Umumnya, sebagai sekolah agama tradisional, pesantren dapat dijumpai di kawasan perdesaan Jawa dan dipimpin oleh ulama atau kiai. Pemuda-pemudi lajang menghabiskan beberapa tahun di beberapa pesantren untuk mempelajari kurikulum Islam tradisional dari berbagai kiai yang berbeda. Semua pesantren yang didatangi oleh Abdul Kahar Muzakir untuk menimba ilmu merupakan pesantren-pesantren terkenal di Jawa Tengah. Terkait pembahasan singkat nan mencerahkan tentang signifikansi pesantren bagi masyarakat Jawa, lihat Benedict R. O’G. Anderson, *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946* (Ithaca: Cornell University Press, 1972), hlm. 4-10.
- ⁷ *Jawah* adalah istilah umum yang digunakan di Timur Tengah untuk menyebut Dunia Islam Asia Tenggara (mencakup Thailand, Semenanjung Malaya, Kepulauan Indonesia, dan Filipina). Di senja abad XIX dan dekade-dekade awal abad XX, orang-orang Jawah yang datang ke Mekkah untuk berhaji jumlahnya adalah yang paling dominan jika dibandingkan dengan jamaah haji dari tempat lain. Di samping itu jumlah pelajar Jawah di Timur Tengah pun cukup banyak. Lihat C. Snouck Hurgronje, *Mekka in the Latter Part of the 19th Century: Daily Life, Customs and Learning of the Moslems of the East-Indian Archipelago*, diterjemahkan oleh J.H. Monahan (Leiden: Brill, 1931).
- ⁸ Untuk nama-nama organisasi ini, saya mengikuti orbituari Prof. Abdul Kahar Muzakir yang ditampilkan dalam *Suara Muhammadiyah*. Untuk aktivitas organisasi kedua, dan pemimpin-pemimpinnya, lihat William R. Roff, “Indonesian and Malay Students...” Dalam tulisan itu Roff menyebutnya sebagai “Djama’ah al-Chairiah al-Talabijja al-Azharian al-Djawiah,” atau Perhimpunan Kesejahteraan Pelajar “Jawa” di Universitas Al-Azhar, *ibid.*, hlm. 73.
- ⁹ *Ibid.*
- ¹⁰ Bandingkan dengan Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942* (Oxford University Press, 1973), hlm. 157–161.
- ¹¹ Terkait pembahasan mendasar soal partisipasi organisasi Islam dalam pemerintahan pendudukan Jepang, lihat Harry J. Benda, *The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945* (The Hague: W. van Hoeve, 1958). Terkait pembahasan lebih khusus soal

perkembangan politik yang mengemuka dalam beberapa bulan terakhir masa pendudukan Jepang, lihat Benedict R. O'G. Anderson, *Some Aspects of Indonesian Politics under the Japanese Occupation, 1944-1945* (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1961).

- ¹² Menghadapi tuntutan umat Islam yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar Negara Indonesia yang merdeka, Sukarno mengajukan kompromi dalam wujud preambuli Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang secara khusus menyebutkan—di samping Pancasila—kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dokumen ini kemudian dikenal sebagai *Piagam Jakarta*. Akan tetapi, di tengah huru-hara di pertengahan Agustus 1945 (ketika UUD 1945 secara resmi digunakan) bagian kontroversial dari preambuli di atas dihapus. Di akhir 1950-an, dalam perdebatan di Dewan Konstituante berbagai partai politik Islam menuntut agar Piagam Jakarta kembali dijadikan preambuli resmi untuk undang-undang yang sedang diajukan untuk menggantikan UUDS 1950. Lihat Legge, *Sukarno: A Political Biography*, hlm. 188–189, 208, dan 303–304.
- ¹³ Kampus ini dan beberapa IAIN lainnya dibentuk pada 1950-an untuk mengakomodir permintaan umat Islam atas lembaga pendidikan tinggi Islam negeri yang dikelola di bawah Kementerian Urusan Agama, terpisah dari perguruan-perguruan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekuler itu. Lihat Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions* (Berkeley: The University of California Press, 1972), hlm. 104–112.
- ¹⁴ Partai Masyumi adalah kendaraan politik bagi Muhammadiyah dan beberapa organisasi Islam reformis lainnya, berkebalikan dengan Nahdlatul Ulama yang merupakan partainya Muslim tradisional. Soal sejarahnya di era pra-Perang Dunia II, lihat Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia*.
- ¹⁵ *Suara Muhammadiyah*, No. 24, Th. ke-53 (Desember 1973).
- ¹⁶ Hamka, "Kenang-kenangan kepada Professor Abdul Kahar Muzakkir," *Suara Muhammadiyah*, hlm. 3 dan 20. Hamka, atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah, putra seorang tokoh Islam reformis yang begitu disanjung di Minangkabau, Haji Abdul Karim Amrullah. Barangkali, Hamka sempat menjadi penulis yang paling produktif di lingkungan Muhammadiyah, dan pernah pula menjadi pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- ¹⁷ Arah kiblat amat sangat penting bagi Muslim reformis, pasalnya itu bukan hanya diperintahkan oleh Kitab Suci, melainkan juga dapat diperhitungkan dengan akurat berbekal pengetahuan dan teknik ilmiah. Dahulu, masjid-masjid di Yogyakarta dibangun menghadap barat saja, bukan menghadap Mekkah, dan hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap agama sekaligus pertanda bangkrutnya pengetahuan masyarakat. Kritik serupa juga berlaku pada kebiasaan-kebiasaan yang menyertai mulainya bulan puasa. Bandingkan dengan Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia*, hlm. 74, 76, 81, 224.
- ¹⁸ Terkait reformisme Muhammad 'Abduh dan Rashid Ridha, lihat Malcolm

- H. Kerr, *Islamic Reform: The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Rida* (Berkeley and Los Angeles: The University of California Press, 1966). Menyangkut contoh pandangan “ortodoks” tentang pengaruh reformisme Islam langgam Mesir di Indonesia, lihat Clifford Geertz, *The Religion of Java* (The Free Press of Glencoe, 1960), hlm. 137–138.
- ¹⁹ Roff, “Indonesian and Malay Students...”, hlm. 74.
- ²⁰ *Ibid.*
- ²¹ Pembahasan yang terperinci soal perkembangan politik di Indonesia sepanjang 1950-an (periode demokrasi parlementer) tersaji dalam tulisan Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1962). Soal ikhtisar gerakan-gerakan Islam dalam periode tersebut dan setelahnya, lihat B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, No. 59, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971).
- ²² Benedict R. O’G. Anderson, “The Idea of Power in Javanese Culture,” dalam Claire Holt (peny.), *Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1972), hlm. 1–69, khususnya hlm. 61–62.
- ²³ Benda, *The Crescent and The Rising Sun*, khususnya hlm. 195–204.
- ²⁴ Terkait konsep aliran yang diadopsi dan diuraikan ke dalam bahasa analisis, lihat Clifford Geertz, “The Javanese Village,” dalam G. William Skinner (peny.), *Local, Ethnic and National Loyalties in Village Indonesia: A Symposium*. Southeast Asia Studies, Cultural Report Series No. 8 (New Haven: Yale University, 1959), hlm.37–41; dan *The Social History of an Indonesian Town* (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1965), hlm. 127–129, 147–149.
- ²⁵ Clifford Geertz, “Religious Change and Social Order in Soeharto’s Indonesia,” *Asia*, No. 27 (Autumn 1972), hlm. 62–84.
- ²⁶ Selain karya Hamka yang bertajuk “Kenang-kenangan kepada Professor Abdul Kahar Muzakkir,” ada pula karya lain berbahasa Indonesia tentang kehidupan dan kiprah Prof. Abdul Kahar Muzakkar, di antaranya: Tjiptoning, “Over Prof. Abdul Kahar Muzakkir,” *Cultureel Nieuws Indenesie* (Amsterdam), No. 20, Islam-numer, 1952, hlm. 370–372; Toana Rusdy, “Prof. Abdul Kahar Muzakkir,” *Hikmah*, Tahun ke-X, No. 46 (Desember 14, 1957), hlm. 16-17; K.H.S. Agustjik, “Prof: Abdul Kahar Muzakkir fi zimmatillah,” *Abadi* (Desember 7, 1973); Prof. Dr. H.M. Rasjidi, “Mengenang Almarhum Prof. A. Kahar Muzakkir,” *Abadi*, (Desember 12 dan 13, 1973).
- ²⁷ Terkait *pamrih*, lihat juga Anderson, “The Idea of Power,” hlm. 39–40. Tentang *ikhlas*, lihat Anderson, *Java in a Time of Revolution...*, hlm. 5–6.
- ²⁸ Harry J. Benda, “Continuity and Change in Indonesian Islam,” *Asian and African Studies* (Jerusalem 1965), hlm. 123–138; khususnya hlm. 133.
- ²⁹ Bandingkan dengan *Verslag Moehammadijah di Hindia-Timoer, Tahun ke-X* (Djakakarta: Pengoeroes Besar Moehammadijah, 1923), hlm. 11; *Peringatan Congres Moehammadijah ke-XXI* (Yogyakarta: Hoofdbestuur Moehamadijah Hindia-Timoer, 1932), hlm. 42.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustjik, K.H.S. 1973. "Prof: Abdul Kahar Muzakkir fi zimmatillah," *Abadi* (Desember 7, 1973).
- Alfian. 1969. "Islamic Modernism in Indonesian Politics: The Muhammadiyah Movement During the Dutch Colonial Period, 1912-1942." Disertasi doktoral di University of Wisconsin.
- Anderson, Benedict R. O'G. 1961. *Some Aspects of Indonesian Politics under the Japanese Occupation, 1944-1945*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.
- _____. 1972. "The Idea of Power in Javanese Culture." Dalam Claire Holt (peny.). 1972. *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- _____. 1972. *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*. Ithaca: Cornell University Press.
- Benda, Harry J. 1958. *The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945*. The Hague: W. van Hoeve.
- _____. 1965. "Continuity and Change in Indonesian Islam," *Asian and African Studies* (Jerusalem 1965).
- van den Berg, L.W.C. 1883, "Over de devotie der Naqsjibendijah in den Indischen Archipel," *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*. Batavia: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, XXVIII.
- Boland, B.J. 1971. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, No. 59. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Feith, Herbert. 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Geertz, Clifford. 1959. "The Javanese Village." Dalam G. William Skinner (peny.). 1959. *Local, Ethnic and National Loyalties in Village Indonesia: A Symposium*. Southeast Asia Studies, Cultural Report Series No. 8. New Haven: Yale University.
- _____. 1960. *The Religion of Java*. The Free Press of Glencoe.
- _____. 1965. *The Social History of an Indonesian Town*. Cambridge, Mass.: The MIT Press.
- _____. 1972. "Religious Change and Social Order in Soeharto's Indonesia," *Asia*, No. 27 (Autumn 1972).
- Hamka, "Kenang-kenangan kepada Professor Abdul Kahar Muzakkir," *Suara Muhammadiyah*, No. 24, Th. ke-53 (Desember 1973).
- Harvey, Barbara. 1974 "Tradition, Islam and Rebellion, South Sulawesi, 1950-1965". Disertasi doktoral di Cornell University.
- Hoofdbestuur Muhammadiyah. 1923. *Verslag Moehammadijah di Hindia-Timoer, Tahun ke-X*. Djokjakarta: Pengoeroes Besar Moehammadijah.
- _____. 1932. *Peringatan Congres Moehammadijah ke-XXI*. Yogyakarta: Hoofdbestuur Moehammadijah Hindia-Timoer.
- Hurgronje, C. Snouck. 1931. *Mekka in the Latter Part of the 19th Century: Daily Life, Customs and Learning of the Moslims of the East-Indian Archipelago*. Leiden: Brill.

- Kartodirdjo, Sartono. 1966. *The Peasant Revolt of Banten in 1888. Its Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*. The Hague: De Nederlandsche Boek- en Steendrukkerij v/h Smits.
- Kerr, Malcolm H. 1966. *Islamic Reform: The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Rida*. Berkeley and Los Angeles: The University of California Press.
- Legge, J.D. 1973. *Sukarno: A Political Biography*. London: Pelican Books.
- Lev, Daniel S. 1972. *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*. Berkeley: The University of California Press.
- van Mook, H.J. 1958. "Kuta Gede." Dalam W.F. Wertheim (peny.). 1958. *The Indonesian Town: Studies in Urban Sociology*. The Hague: W. van Hoeve.
- Nakamura, Mitsuo. 1976. "The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town." Disertasi doktoral di di Cornell University.
- Noer, Deliar. 1973. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*. Oxford University Press.
- Rasjidi, M. 1973. "Mengenang Almarhum Prof. A. Kahar Muzakkir," *Abadi*, (Desember 12 dan 13, 1973).
- Roff, William R. 1970. "Indonesian and Malay Students in Cairo in the 1920's," *Indonesia*, No. 9 (April 1970), hlm. 73-87.
- Rusdy, Toana. 1957. "Prof. Abdul Kahar Muzakkir," *Hikmah*, Tahun ke-X, No. 46 (Desember 14, 1957)
- Suara Muhammadiyah*, No. 24, Th. ke-53 (Desember 1973).
- Tjiptoning. 1952. "Over Prof. Abdul Kahar Muzakkir," *Cultureel Nieuws Indonesie* (Amsterdam), No. 20, Islam-numer.

